

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Adha, L. H. (2022). *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal (AKP) Asing*. 2(3).
- Administrasi, Biro Kepegawaian, K. dan I. (2023). *Pekerjaan : Memahami Tujuan Utama Seseorang Bekerja*. Biro Administrasi Kepegawaian, Karir Dan Informasi (Bakri), Universitas Medan Area. <https://bakri.uma.ac.id/pekerjaan-memahami-tujuan-utama-seseorang-bekerja/>
- Agustini, S. (2021). *Kedudukan Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang Bertentangan dengan Hukum*. 4(3).
- Ahriani Wattimena, Josina Augustina Yvonne Anwar, A. (2021). Tanggungjawab Negara Bendera Kapal Terhadap Perbudakan ABK Indonesia. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 51–68. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/548/0>
- Amelia, R. (2021). *Tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami phk berdasarkan undangundang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja*. Universitas Hasanuddin.
- Aziz, F., & Sudiarawan, K. A. (2022). Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(2), 413–423. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p13>
- Brief, O. (2018). *Ringkasan kajian Ombudsman RI (Policy Brief) aspek maladministrasi dalam penempatan dan kepulauan pekerja migran*.
- Cantika putri, F. tasya. (2023). *Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Kasasi Putusan Perkara Nomor: 582.K/Pdt.Sus-PHI/2020)*. Universitas Nasional.
- Cahyaningrum, D. (2011). *Aspek Hukum Penempatan Dan Perlindungan Tenagakerja Indonesia Oi Luar Negeri Dalam UU No. 39 Tahun 2004 Dan Perda No.2 Tahun 2004 (Studi terhadap Pengaturan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Jawa Timur)*. 4(39).
- Clara Indira, Fajar Sugianto, G. J. (2021). *Kegagalan perlindungan hukum bagi awak kapal indonesia sebagai implikasi dari disharmonisasi mekanisme perekrutan awak kapal*. 2(2).
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>
- Disemadi, H. S. (2022). *Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi*

- Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Fadilla Octaviani, Gridanya Mega Laidha, A.M. Lolo Hanafiah Makkasau, Anissa Yusha Amalia, Harimuddin Hary, S. I. (2022). Lingkaran Setan Pekerjaan Di Laut: Perikanan Migran Indonesia. *Indonesia Ocean Justice Initiative*, 64.
- Gabby Agnesya, H. N. S., & Dewi, C. T. I. (2022). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbudakan Modern yang Dialami Pekerja Migran Indonesia di Kapal Long Xing 629 Milik Cina Ditinjau dari Prinsip Bisnis dan HAM. *Jurist-Diction*, 5(2), 495–520. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34891>
- Husni, L. (2010). *Asas Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Untuk Mewujudkan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermartabat*. 4, 132–150.
- International Labour, O. (2022). *Panduan Teknis Penyelenggaraan Layanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang Responsif Gender (Implementasi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017)*.
- International Organization for Migration. (2022). *IOM Indonesia dan BP2MI Uji Coba Orientasi Pra-Pemberangkatan di Mataram*. International Organization for Migration. [https://indonesia.iom.int/id/news/iom-indonesia-dan-bp2mi-uji-coba-orientasi-pra-pemberangkatan-di-mataram#:~:text=Orientasi Pra-Pemberangkatan \(OPP\),tentang pelindungan pekerja migran Indonesia](https://indonesia.iom.int/id/news/iom-indonesia-dan-bp2mi-uji-coba-orientasi-pra-pemberangkatan-di-mataram#:~:text=Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP),tentang%20pelindungan%20pekerja%20migran%20indonesia).
- Jamil, Roazi, N. (2023). *Perlindungan hukum terhadap awak kapal selama bekerja di kapal asing*. Universitas Islam Indonesia.
- L. Hadi Adha, Djumardin, A. R. (2017). Kebijakan Penyelenggaraan Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri [Universitas Mataram]. In *Eprints.Unram.Ac.Id*. [http://eprints.unram.ac.id/22013/1/Kebijakan penyelenggaraan pengawasan penempatan tenaga kerja indonesia Di Luar negeri.pdf](http://eprints.unram.ac.id/22013/1/Kebijakan%20penyelenggaraan%20pengawasan%20penempatan%20tenaga%20kerja%20indonesia%20Di%20Luar%20negeri.pdf)
- Lailatul Mahmudah, I. (2020). *Peran pemerintah dalam perlindungan hukum pra penempatan pekerja migran indonesia*. 4(4), 1–15.
- Lelisari, Imawanto, & Fahrurrozi. (2019). *Kajian yuridis undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia*. 230–236.
- Lydia Ardana Wiyantoro, S. (2022). *Perlindungan hukum terhadap anak buah kapal ikan asing berdasarkan uu no.18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia dan konvensi ilo (international labour organization) no. 188 tahun 2007*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum* (6th ed.). Kencana Prenada Media Group.

- Medina Sari, A. (2023). *Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban/>
- Merdekawati, A., Darma, S. A., Purnamawati, V., & Hasibuan, I. A. T. (2022). *Peran Rezim Cipta Kerja Dalam Mengakhiri Tumpang Tindih Perizinan Manning Agent Awak Kapal Perikanan Migran*. 6(2).
- Ndarujati, D. (2021). Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan. *Jurnal Sosial Sains*, 1(1), 17–29. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i1.3>
- Niru Anita Sinaga, T. Z. (2021). *Perlindungan Hukum dan Hak-hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia*. 13.
- Nola, L. F. (2020). *Dampak Pelanggaran Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Impact of Violation of Time Limits for the Establishment of Implementing Regulations for Law Number 18 of 2017 on*. 18, 249–266.
- Nola, L. F. (2021). *Penguatan Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Awak Kapal Perikanan*. XIV(1), 7–12.
- Nur, M. (2014). *Perlindungan hukum internasional pekerja migran bidang perikanan di kapal perikanan asing*. Universitas Hasanuddin.
- Nur, M. (2018). *Recommendation for authorization overlapping of placement of indonesian fishing vessels crews abroad*. 6(1).
- Octaviani, F., Rositawati, D., Laidha, G. M., Prasetya, J. H., Makkasau, A. M. L. H., & Amalia, A. Y. (2022). *Potret Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan di Kapal Asing: Tinjauan Huku, HAM, dan Kelembagaan*.
- Pratiwi, W. B. (2018). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Upah Bagi Pekerja Migran Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1). <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i1.498>
- Probosiwi, R. (2015). *Analisis undang-undang perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri*. 5(2), 200–212.
- Rachmawati, A. D., & Dantes, K. F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 223.
- Ridwan Wahyudi, Risca Dwi Ambarsari, S. W. W. (2018). Evaluasi Pelayanan Migrasi Ketenagakerjaan Antara Aturan dan Pelaksanaan. *Jakarta Selatan: Jaringan Buruh Migran*. [https://www.academia.edu/download/59774172/Evaluasi\\_Pelayanan\\_Migrasi\\_K](https://www.academia.edu/download/59774172/Evaluasi_Pelayanan_Migrasi_K)

etenagakerjaan20190617-91647-tyhj qb.pdf

- Ritanto, E. P. (2018). *Etos kerja masyarakat nelayan kecil kelurahan bagan deli, belawan, medan*. 13, 61–70.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/sabda.13.1.67-76>
- Rondonuwu, D. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, VI(8), 81–86.
- Saksono, H. (2013). *Ekonomi biru: solusi pembangunan daerah berciri kepulauan studi kasus kabupaten kepulauan anambas*. 1.
- Saputro, F. D. (2008). Tanggung jawab hukum pt. Asuransi jasa indonesia dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang di laut ( Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta ). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan*.
- Saribu, D., & Hamonangan, J. S. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Adopsi Ditinjau Dari Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Universitas Kristen Indonesia.
- Setiyono, M. (2019). *Hak Korban Human Trafficking Lintas Negara untuk Tujuan Perbudakan Sebagai Hak Asasi Manusia: Studi Kasus ABK PT. Kwojeng*. Universitas Indonesia.
- Solang, M. (2011). Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan Hak Dan Keselamatan Pekerja Migran. *Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 2011*, 8, 1–6.
- Subhan, H. (2012). Perlindungan Tki Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jakarta*, 15–17.
- Sumiyati. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak. *Sigma-Mu*, 5(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35313/sigmamu.v5i1.849>
- Surjono, O. (2023). *Perlindungan hukum terhadap anak buah kapal yang bekerja pada perusahaan perkapalan nasional di tinjau dalam perspektif hukum ketenagakerjaan* (Vol. 87, Issue 1,2). Universitas Bosowa Makassar.
- Syahputra, D. S. (2020). *Upaya penyesuaian fasilitas akomodasi untuk mendukung kelayakan kapal mv. Selili baru* (Vol. 2507, Issue February). Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- Tantri, E. M., Karamoy, D. N., & Paseki, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap

Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Privatum*, 10(3), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41008/36672>

Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107–116. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>

## Web

Affan, H., & Wijaya, C. (2020). *ABK Indonesia di kapal China: “Tidur hanya tiga jam, makan umpan ikan”, hingga pengalaman pahit yang sulit dilupakan melarung jenazah teman.* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52466661>

Ambari, M. (2021). *Rekrutmen Awak Kapal Perikanan Masih Belum Transparan.* MONGABAY. <https://www.mongabay.co.id/2021/10/01/rekrutmen-awak-kapal-perikanan-masih-belum-transparan/>

Ambari, M. (2022). *Praktik Kerja Paksa Terus Hantui Para Pekerja Migran Perikanan Indonesia.* MONGABAY. <https://www.mongabay.co.id/2022/09/20/praktik-kerja-paksa-terus-hantui-para-pekerja-migran-perikanan-indonesia/>

ANTARA. (2021). *DFW: 35 WNI awak kapal perikanan meninggal di luar negeri.* ANTARA. <https://www.antaraneews.com/berita/2235958/dfw-35-wni-awak-kapal-perikanan-meninggal-di-luar-negeri>

Bimantara, johanis G. (2020). *Pemalsu Sertifikat Pelaut Diungkap, Juga Memasok Dokumen ABK yang Loncat dari Kapal.* Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/metro/2020/06/25/pemalsu-sertifikat-pelaut-diungkap-juga-memasok-dokumen-abk-yang-loncat-dari-kapal><https://www.kompas.id/baca/metro/2020/06/25/pemalsu-sertifikat-pelaut-diungkap-juga-memasok-dokumen-abk-yang-loncat-dari-kapal>

BP2MI. (2020). *BP2MI Selamatkan 25 Calon PMI di Penampungan Ilegal.* Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. <https://www.bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/bp2mi-selamatkan-25-calon-pmi-di-penampungan-ilegal>

Dewi. (2021). *51 Awak Kapal Tak Bisa Pulang, Pemerintah Diminta Koordinasi dengan Cina.* CHANNEL9.Id. <https://channel9.id/51-awak-kapal-tak-bisa-pulang-pemerintah-diminta-koordinasi-dengan-cina/>

DFW. (2022). *Perjanjian Kerja Laut dan Ancaman Eksploitasi Kerja di Kapal Perikanan.* Destructive Fishing Watch Indonesia. <https://dfw.or.id/perjanjian-kerja-laut-dan-ancaman-eksploitasi-kerja-di-kapal-perikanan/>

- DFW. (2023). *Rentetan Pelanggaran Hak Awak Kapal Perikanan di Pelabuhan Muara Baru*. Destructive Fishing Watch Indonesia. <https://dfw.or.id/rentetan-pelanggaran-hak-awak-kapal-perikanan-di-pelabuhan-muara-baru/>
- Grahadyarini, B. L. (2022). *Sistem Pengupahan Awak Kapal Perikanan Belum Berkeadilan*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/11/16/sistem-pengupahan-abk-belum-berkeadilan>
- Halim, D., & Carina, J. (2020). *45 ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing Mengaku Belum Terima Gaji, Totalnya Rp 2,9 Miliar*. KOMPAS.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/21/06081301/45-abk-indonesia-di-kapal-ikan-asing-mengaku-belum-terima-gaji-totalnya-rp>
- Ham, K. H. dan. (2017). *Sejarah Kementerian Hukum dan HAM*. Kementerian Hukum Dan HAM. <https://www.kemenkumham.go.id/profil/tentang-kemenkumham-ri/sejarah-kemenkumham-ri>
- Harruma, I. (2022). *Tugas dan Wewenang KPPU*. KOMPAS.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/13/03250031/tugas-dan-wewenang-kppu>
- HukumOnline. (2022). *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>
- Idris, M. (2021). *Derita ABK WNI di Kapal Asing: Diperbudak di Laut, Gaji Urung Dibayar*. KOMPAS.Com. <https://money.kompas.com/read/2021/12/05/114243326/derita-abk-wni-di-kapal-asing-diperbudak-di-laut-gaji-urung-dibayar?page=all>
- Kemenko. (2022). *Pemerintah Upayakan Biaya Penempatan Tidak Membebani Pekerja Migran*. Ementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-upayakan-biaya-penempatan-tidak-membebani-pekerja-migran>
- Koral. (2022). *Terbitnya peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2022: apakah kehidupan pekerja migran sektor kp memasuki babak baru?* Koral. <https://koral.info/id/terbitnya-peraturan-pemerintah-nomor-22-tahun-2022-apakah-kehidupan-pekerja-migran-sektor-kp-memasuki-babak-baru/>
- Laut, J. D. P. (2023). *Ditjen Perhubungan Laut Terima Audiensi Serikat Buruh Sektor Maritim, Bahas Pelindungan Terhadap Pelaut*. Jenderal Direktorat Perhubungan Laut. <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/16238/ditjen-perhubungan-laut-terima-audiensi-serikat-buruh-sektor-maritim-bahas-perlindungan-terhadap-pelaut>

- Lismartini, E., & Adrianjara, D. (2016). *Data Tak Sinkron, Penanganan TKI Tak Maksimal*. VIVA.Co.Id. <https://www.viva.co.id/berita/dunia/859896-data-tak-sinkron-penanganan-tki-tak-maksimal>
- Mazaya, M. (2023). *8 Lembaga Penegak Hukum di Indonesia Wajib Tahu. Ada Polisi dan KPK*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6818558/8-lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-wajib-tahu-ada-polisi-dan-kpk>
- Migrant Care. (2017). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. MigrantCare. <https://migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/#:~:text=Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,-Kebijakan%2C Headline%2C Berita&text=Setelah disahkan pada>
- Mustajab, A. (2021). *Awak Kapal Perikanan Indonesia Terjebak Di Perairan China*. INANEWS.Co.Id. <https://www.inanews.co.id/2021/01/awak-kapal-perikanan-indonesia-terjebak-di-perairan-china/>
- Mustajab, R. (2023). *Jumlah Pekerja Migran Indonesia Sebanyak 3,44 Juta pada 2022*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/jumlah-pekerja-migran-indonesia-sebanyak-344-juta-pada-2022>
- Ombudsman. (2019). *Ombudsman RI Kritisi PTSP Pemkot Bandarlampung*. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-kritisi-ptsp-pemkot-bandarlampung>
- Pujianti, S. (2020). *Kesaksian Pekerja Migran: Pekerjaan Acapkali Tak Sesuai Kontrak Kerja*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16584&menu=2>
- Rahardyan, A. (2022). *Jaminan Sosial untuk Pekerja Migran Terganjil Akses Pembayaran*. Bisnis.Com. <https://finansial.bisnis.com/read/20220629/215/1548991/jaminan-sosial-untuk-pekerja-migran-terganjal-akses-pembayaran>
- Rangkuti, M. (2023). *Apa Itu Mahkamah Agung? Fungsi, Tugas, dan Wewenangnya*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-mahkamah-agung-fungsi-tugas-dan-wewenang/#:~:text=Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk,sesuai dengan hukum dan keadilan.>
- Retnaningsih, H. (2023). *Masalah perlindungan anak buah kapal (abk) migran*. 2–3.
- RI, D. (2014). *Permasalahan TKI Sangat Kompleks*. DPR RI. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/8812/t/Permasalahan TKI Sangat Kompleks>

- Siregar, H. (2015). *Menteri Yohana Ungkap 7 kelemahan UU TKI*. Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/news/287806/menteri-yohana-ungkap-7-kelemahan-uu-tki>
- Suminar, A. (2020). *Satu Lagi ABK WNI di Kapal Ikan China Meninggal, DFW Usulkan Moratorium*. Suarasurabaya.Net. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/satu-lagi-abk-wni-di-kapal-ikan-china-meninggal-dfw-usulkan-moratorium>
- W.Finaka, A. (2020). *Sejarah Tenaga Kerja Indonesia di Mancanegara*. Indonesiabaik.Id. [https://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/sejarah-tenaga-kerja-indonesia-di-mancanegara](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-tenaga-kerja-indonesia-di-mancanegara)
- Wismabrata, M. H. (2022). *Memberantas Sindikat Perekrutan TKI Ilegal, Migrant Care: Aktor Utama dan Korporasinya Belum Tersentuh*. KOMPAS.Com. <https://regional.kompas.com/read/2022/03/23/181320878/memberantas-sindikat-perekrutan-tki-ilegal-migrant-care-aktor-utama-dan?page=all>

### **Buku**

- Trijono, R. (2020). *OMNIBUS LAW: Cipta Lapangan Kerja* (B. Pasaribu & A. Harris (eds.)). Papas Sinar Sinanti.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian* (M. . Dr. Ir. Try Koryati (ed.)). Penerbit KBM Indonesia. [https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16455/1/E-Book Metodologi Penelitian Syafrida.pdf](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16455/1/E-Book%20Metodologi%20Penelitian%20Syafrida.pdf)